■ KAMPUNG PANCASILA

Cak Eri Dorong RW Jadi Motor Kemandirian Warga

PEMERINTAH Kota Surabaya kembali meluncurkan gebrakan baru. Kali ini lewat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kampung Pancasila. Gerakan ini digagas sebagai upaya kolektif membangun kampung yang mandiri, aman, dan sejahtera, dengan melibatkan elemen masyarakat hingga level RT dan RW.

IST

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, satgas ini bukan sebatas pembentukan struktur baru, tetapi langkah nyata dalam memperkuat kampung-kampung berbasis RW agar tangguh secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Kampung Madani sudah berjalan, sekarang kita sempurnakan lewat Satgas Kampung Pancasila. Tujuannya agar tiap wilayah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Mulai dari keamanan, pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan ekonomi," ujar Eri, Senin (7/7).

Menurut dia, kunci utama keberhasilan gerakan ini terletak pada peran aktif masyarakat. Pemerintah hanya sebagai fasilitator, sementara motor penggeraknya ada pada warga, RT, RW, Kader Surabaya Hebat (KSH), komunitas, kampus, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

"Ini gerakan kolektif. Kita bangun kampung yang tidak cuma aman dan nyaman, tapi juga ramah anak, sehat, dan tangguh terhadap bencana," tegasnya.

Di tingkat kota, Satgas Kampung Pancasila dikomandoi oleh Kepala BPBD Surabaya. Satgas ini memiliki empat bidang kerja utama: Lingkungan, Kemasyarakatan, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya. Sementara di tingkat kelurahan dan kecamatan, Ketua RW menjadi ujung tombak, didukung perangkat wilayah serta satgas lokal. **(dim/rek)**

■ EVALUASI PEMILU

IST

SIDAK: Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno meninjau kantor KPU Jatim.

Sekjen KPU RI Sidak Kantor KPU Jatim

SEKRETARIS Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Bernad Dermawan Sutrisno melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Raya Tenggilis Nomor 1–3, Surabaya. Kedatangan Bernad disambut hangat oleh Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini beserta seluruh jajaran struktural dan fungsional KPU Jatim.

Dalam arahannya, Sekjen KPU mendorong seluruh jajaran di lingkungan sekretariat KPU Jatim agar terus meningkatkan kinerja kelembagaan, menjaga soliditas, serta mendorong berbagai inovasi pasca selesainya tahapan pemilu.

"Kinerja pasca-pemilu tidak boleh menurun. Justru harus menjadi momentum untuk memperkuat lembaga dan mempersiapkan agenda ke depan," ujar Bernad kemarin.

Dalam kunjungan tersebut, Bernad turut didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mashur Sampurna Jaya serta Kepala Biro Umum Kusmanto Riwu Djo Naga. Tak hanya berkunjung ke kantor KPU Jatim, Sekjen KPU juga menyempatkan diri meninjau langsung Mes KPU Jatim yang berlokasi di Jalan Tenggilis Tengah I Blok K 24 Surabaya.

Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini menyampaikan bahwa kunjungan Sekjen KPU tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi fisik bangunan mes yang selama ini digunakan sebagai tempat transit dan menginap bagi jajaran pimpinan serta sekretariat KPU Jatim. **(dim/rek)**

DIMAS MAHENDRA/RADAR SURABAYA

SIAGA: Petugas bersiaga di Posko SPMB yang disediakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Ribuan Siswa Daftar di SMP Swasta

Sebagian Kategori Keluarga Miskin

SURABAYA–Lebih dari seribu calon siswa baru jenjang SMP sudah melakukan pendaftaran di SPMB sekolah swasta di Kota Surabaya. Sebanyak 445 anak mendaftar di jalur afirmasi keluarga miski. Kemudian 675 anak mendaftar di jalur reguler.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Putri Aisyah Mahanani mengungkapkan, warga yang mendaftar di sekolah swasta ini, jika termasuk kategori keluarga miskin tidak perlu khawatir akan dapat intervensi atau tidak. Sebab, Pemerintah Kota Surabaya memiliki acuannya tersendiri dalam memberikan intervensi itu.

Dia pun menjamin mereka yang termasuk miskin akan mendapat intervensi yang sama meskipun mereka bersekolah di sekolah swasta. "Jangan khawatir pasti dapat intervensi yang sama. Baik negeri ataupun swasta," kata Putri.

Dia melanjutkan, teknis pendaftaran di swasta kurang lebih sama seperti negeri. Semuanya bisa dilakukan melalui *website* yang sudah disediakan dinas pendidikan.

Dalam tahapan pemberian intervensi, menurut dia, pemerintah kota tidak asal bergerak. Ada data yang digunakan sebagai rujukan terkait para calon penerima manfaat. Sehingga, bisa dipastikan penerimanya tepat sasaran.

"Data keluarga miskin akan konek dengan data yang ada di pemerintah kota. Jadi, semisal si A daftar menggunakan jalur selain afirmasi. Kalau dia ada di data penerima manfaat seperti DTKS itu, dia tetap akan dapat intervensi dari pemerintah," ujarnya.

Oleh karena itu, dia pun mengajak pada wali murid yang mungkin masih merasa bingung mengenai teknis pendaftaran dan sebagainya, bisa segera mendatangi posko layanan dinas pendidikan. Selain posko di dinas pendidikan, masing-masing sekolah juga menyediakan posko layanan SPMB untuk memberikan informasi yang akurat pada para wali murid.

"Memang kita sekarang sudah fokus untuk layanan SPMB sekolah swasta. Semoga tetap berjalan lancar sampai nanti di hari H penutupan pendaftaran," pungkasnya. **(dim/rek)**

Khofifah Apresiasi Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Raperda RPJMD Jatim Disahkan

INDRAPURA–Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2025-2029 resmi disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Senin (7/7). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan dokumen pembangunan lima tahunan tersebut.

"Terima kasih atas komitmen, dedikasi, dan kesungguhan luar biasa dari semua pihak yang telah terlibat," ujar Khofifah.

Menurut dia, RPJMD ini disusun untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Ia berharap pelaksanaannya bisa tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

IST

DISAHKAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani Perda RPJMJ Jatim 2025-2029, Senin (7/7).

Dalam sidang paripurna tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir sebelum dilakukan pengambilan keputusan dan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Hadir pula Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim, serta para kepala perangkat daerah.

Khofifah menjelaskan, penyusunan RPJMD telah melalui berbagai tahapan sesuai ketentuan. Konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kemenpan RB juga telah dilakukan. "Semua prosedur dan SOP sudah dijalankan. Ini bentuk nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif," tegasnya.

Dokumen RPJMD yang telah disepakati ini akan dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda. Setelah resmi menjadi Perda, RPJMD akan menjadi acuan utama perangkat daerah provinsi serta menjadi rujukan penyusunan RPJMD kabupaten/kota di Jatim. **(mus/rek)**

Setelah Sosialisasi selama Dua Bulan

Bangli di Atas Saluran Kalibutuh Timur Ditertibkan

Setelah melalui proses sosialisasi sejak Mei lalu, Pemerintah Kota Surabaya akhirnya melakukan penertiban terhadap bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di atas saluran air di Jalan Patua Kalibutuh Timur, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan.

Dimas Mahendra, *Wartawan Radar Surabaya*

PENERTIBAN dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan dukungan lintas instansi, Senin (7/7). Langkah ini merupakan bagian dari program normalisasi saluran yang digalakkan Pemkot untuk mengantisipasi banjir serta mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur aliran air yang bersih dan lancar.

Lurah Tembok Dukuh Agustinus Heru Prasetyo mengatakan, sebelum penertiban dilakukan, pihaknya telah melakukan serangkaian sosialisasi kepada warga, khususnya di wilayah RT 02 RW 07, yang terdampak langsung. "Kami sudah menyampaikan sejak awal bahwa ini bukan soal menggusur, tapi bagian dari penataan kota. Kami ingin sungai kembali berfungsi sebagaimana mestinya, dan warga bisa hidup di lingkungan yang sehat dan aman," ujarnya.

IST

TEGAS: Petugas membongkar lapak pedagang yang berdiri di atas saluran air Jalan Kalibutuh Timur.

Dalam pertemuan sebelumnya, sosialisasi juga melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas setempat, serta perwakilan Satpol PP dari Kecamatan Bubutan dan Koorwil Surabaya Pusat. Warga diberikan pemahaman soal pentingnya menjaga saluran air, sekaligus diberi kesempatan membongkar sendiri bangunannya.

Menurut data dari kelurahan, terdapat belasan bangunan semipermanen di atas saluran, mayoritas digunakan sebagai tempat tinggal dan usaha kecil. Keberadaan bangunan tersebut menyebabkan penyempitan dan penyumbatan aliran, terutama saat musim hujan.

Penertiban ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, khususnya Pasal 22 ayat 1, yang melarang setiap orang atau badan hukum merusak atau mengganggu fungsi drainase, jalur hijau, maupun fasilitas umum.

Ketua RW 07 Kalibutuh Timur Samad mengakui sebagian warga merasa khawatir akan kehilangan tempat tinggal atau usaha. Namun, ia berharap pemerintah memberikan solusi yang adil. "Kalau memang harus dibongkar, tolong disiapkan juga tempat relokasi atau bentuk bantuan lainnya," ujarnya.

Agustinus menegaskan bahwa penertiban dilakukan secara bertahap. Mulai dari pendataan ulang, pendampingan sosial, hingga koordinasi antarinstansi. Ia juga mengajak warga untuk terus berdialog dan menyampaikan aspirasi selama proses berlangsung.

Usai penertiban, saluran air langsung dibersihkan dan dilakukan pengerukan untuk memperlancar aliran. Pemerintah berharap, dengan normalisasi ini, kawasan Kalibutuh Timur bisa lebih tertata dan bebas dari banjir. **(*/rek)**

layouter: nuryono